

**ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PENDIDIKAN**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Resti Fouziah
NIM. E0013333**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN

Oleh

Resti Fouziah

E0013333

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 18 April 2017

Pembimbing I



Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum
NIP 197805012003121002

Pembimbing II



Maria Madalina, S.H., M.Hum
NIP 196010241986022001

**PENGESAHAN PENGUJI
Penulisan Hukum (Skripsi)**

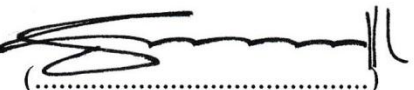


ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
(PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Resti Fouziah
E0013333

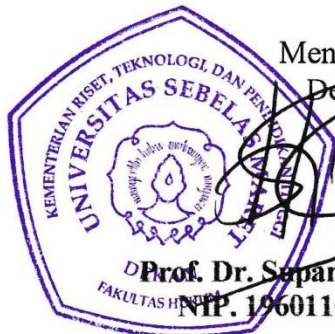
Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari / Tanggal : Senin/ 19 Juni 2017
DEWAN PENGUJI

- 1 Nama : Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 
NIP : 197006212006042001
Ketua
- 2 Nama : Maria Madalina, S.H., M.Hum. 
NIP : 196010241986022001
Sekretaris
- 3 Nama : Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum. 
NIP : 197805012003121002
Anggota

Mengetahui
Dekan 
Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum
NIP. 196011071986011001



PERNYATAAN

Nama : Resti Fouziah
NIM : E0013333

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul :

**ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN
HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL
PENDIDIKAN** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya
dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam
daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar,
maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan
hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 24 April 2017
Yang membuat pernyataan,



Resti Fouziah
NIM. E0013333

ABSTRAK

Resti Fouziah. 2017. E0013333. ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terkait penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah melalui pengaturan penyelenggaraan PTN dan PTN BH diatur oleh beberapa produk hukum dari tingkat Undang-Undang hingga Peraturan Rektor Universitas. Dan bagaimana hak konstitusional terpenuhi melalui otonomi akademik PTN BH

Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dilakukan wawancara untuk melengkapi informasi penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola pikir deduktif.

Pendidikan Tinggi sebagai pilar bangsa dan motor perubahan sosial memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan Tinggi merupakan hak yang terjamin secara konstitusional sebagai *citizen right* dan *human right*. Perkembangan pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia mengalami perubahan status dari waktu ke waktu. Mulai dari Satuan Kerja (PTN Satker) dan yang terakhir adalah Badan Hukum (PTN BH). Namun, hingga saat ini status PTN BH masih menimbulkan polemik pro dan kontra di dalam masyarakat. Secara normatif, penulis mengkaji regulasi yang relevan dengan pengaturan PTN BH dan beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PTN BH.

Kata Kunci : Hak Konstitusional, Pendidikan, Perguruan Tinggi

ABSTRACT

Resti Fouziah. 2017. E0013333. ANALYSIS OF STATE AUTHORITIES FOR IMPLEMENTATION BADAN HUKUM UNIVERSITY (PTN BH) TO FULFILLMENT AN EDUCATIONAL CONSTITUTIONAL RIGHTS. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study describes and examines issues related to the implementation of State University of Legal Entity (PTN BH) which is being held by the Government through the arrangement of PTN and PTN BH arrangements regulated by some legal products from the level of the Act to the Rule of the University. And how constitutional rights are fulfilled through academic autonomy of PTN BH

This research is a normative legal research which is prescriptive. This legal research is using statute approach, case approach, comparative approach, and the concept approach. The research materials used in this legal research is primary legal materials and secondary legal materials. Technique of collecting data used was document study and to complete the data do the retrieval of information by interviews. Technique of analyzing data used in this research was syllogism method with deductive thinking pattern.

Higher Education as a pillar of the nation and motor of social change has a very strategic role in developing the ability and form the character of civilization of a dignified nation. Higher Education is a constitutionally guaranteed right as citizen right and human right. The development of State University management in Indonesia has changed status from time to time. Starting from the Satuan Kerja (PTN Satker) and the last is the Badan Hukum (PTN BH). However, until now the status of PTN BH still raises the polemic of pro and contra in society. Normatively, the authors review the regulations relevant to the regulation of PTN BH and some efforts must be made to optimize the implementation of PTN BH.

Keywords: Constitutional Rights, Education, Higher Education

MOTTO

“DAN YANG INIPUN AKAN BERLALU”

PERSEMBAHAN

*UNTUK MEREKA YANG SELALU MENYEBUT NAMA SAYA DALAM DOA,
MENCINTAI DAN MENYAYANGI SAYA HINGGA HARI INI DAN
SETERUSNYA. AYAH SAYA SAEFUL MALIK, MAMA SAYA ATING SUMIATI,
KEDUA ADIK SAYA HANIF FATHUR ROHMAN DAN HEGAR HUSNI
PARANGINA*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dituangkan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) dari segala yang kami peroleh dengan judul **“ANALISIS WEWENANG NEGARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM (PTN BH) DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PENDIDIKAN”**.

Penulisan Hukum ini membahas bagaimana negara dalam hal ini pemerintah memberikan regulasi melalui perundang-undangan yang ada dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dalam kaitannya dengan pemenuhan hak konstitusional pendidikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis dengan besar hati menerima segala kritik dan saran yang dapat memperkaya pengetahuan penulis di kemudian hari.

Penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan hukum ini:

1. Bapak Prof. Dr. Supanto,S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Bapak Dr. Isharyanto,S.H,M.Hum selaku pembimbing skripsi yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan melalui kritik dan saran yang sangat membangun dalam penyusunan penulisan hukum ini ;
3. Ibu Maria Madalina,S.H,M.Hum selaku pembimbing skripsi atas dukungan dan bimbingan melalui kritik maupun saran yang sangat membangun penulis juga atas motivasi motivasinya untuk membuat saya menjadi manusia yang lebih baik;

4. Bapak Ismunarno, S.H,M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada saya selama masa studi di Fakultas Hukum serta atas motivasi yang sangat membangun ;
5. Keluarga saya tercinta bapak, mamah, adek hanif, dan adek hegar yang telah memberikan segala sesuatunya kepada saya yang selalu mensupport dan mendoakan saya. Banyak hal yang tidak mampu penulis balaskan, hanya doa yang dapat penulis panjatkan
6. Keluarga besar saya di Tasikmalaya yang senantiasa mendoakan dan memberikan support selama perjuangan saya kuliah
7. Keluarga besar Komunitas Studi Pasar Modal (KSPM) pengurus periode 2016-2017 ayu, churin, ata, marthin, ine, wandita, dewi, ayunda, dinda, aminah, anieq, adel, eli, ivan, adit, aji, constantin, daud, fajri, fauzan, tika, kurnia, luthfan, iqbal, pramesthi, klara, wulan. Tak terlupa juga untuk pengurus 2015-2016 mas satria, mbak enty, mbak wulan, mas thamrin, mas ghesa, mbak sonia, mbak sherly, mbak dinar, mbak respati, mas yo dan juga pak yudho.
8. Keluarga besar KSP Principium terkhususnya pengurus di periode 2014-2015 dan periode 2015-2016, terima kasih telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum
9. Keluarga besar Komunitas Debat Fakultas Hukum terkhususnya pengurus di periode 2014-2015 dan pengurus periode 2015-2016 terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada saya
10. Sahabat Happy Family tercinta Inas Hanan Fadhilah, Ivan Renaldi, Rizky Kurnianto, Izzata Laxamana, Yudha Sindu Riyanto, dan juga Pratama Hendrawan Mahardika
11. Teman seperjuangan dalam mengharumkan nama Fakultas Hukum UNS fiqi fatichadiasty, siti aminah, prista prastiwi, dhania alifia, alan adityanta, andy bachrul, pratama hendrawan, nur ghenasyarifa, ivan renaldi, izzata laxamana, satrio pradana, mbak lely, mbak enty, mas thamrin, mas ikhsan, hanna sutopo, fahrizal nurari, rizky kurniyanto

12. Sahabat saya nurlaili sri, fitria fatwa, nistrina nur, alfi nur, indani, nadia, jeanita eka, indani, jessica, anindya

13. Adityo Bagus Rihandono atas dukungan dan semangatnya

14. Saudara, rekan, dan sahabat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Demikian pengantar ini saya sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan

Surakarta, April 2017

Penulis

Resti Fouziah

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Hukum	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	
1. Kewenangan Negara.....	14
2. Pendidikan sebagai Hak Konstitusional.....	15
3. Otonomi Perguruan Tinggi	
a. Hakikat Perguruan Tinggi.....	17
b. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.....	19
c. Otonomi Perguruan Tinggi.....	21
d. Prinsip <i>Good University Governance</i> dalam Perguruan Tinggi	

Negeri.....	23
e. Uji Materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Badan Hukum Pendidikan.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	30
B. Pengaturan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) berdasarkan Hierarki Perundang-undangan	35
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional	37
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	41
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi	55
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum ..	62
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	72
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi	75
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi	79
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	80
C. Pemenuhan Hak Konstitusional Pendidikan melalui Otonomi Akademik Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum	
1. Aksesibilitas Perguruan Tinggi Badan Hukum dan Pemenuhan Otonomi Akademik bagi Mahasiswa	84
2. Mewujudkan Otonomi Akademik Melalui Kerjasama dan Badan Usaha Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)	99

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	121
B. Saran	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1	Tabel 1 Penerapan Prinsip <i>Good University Government</i>	25
Bagan 1	Bagan 1 Alur Pemikiran	27
Tabel 2	Perbedaan universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas	45
Tabel 3	Perbandingan Otonomi Pengelolaan PTN dan PTN BH	62
Tabel 4	Unsur Pengelola PTN dan PTN Badan Hukum	66
Tabel 5	Pangkalan Data Perguruan Tinggi dan Nasional	74
Tabel 6	Kriteria kelayakan PTN Badan Hukum	83
Bagan 2	Scopus List 2015	103
Tabel 7	Pengaturan Kerjasama Perguruan Tinggi	114